

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A. M. Yunus Wahid. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta ; Kencana, 2014.

Bernhard limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2017.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi. *Penelitian hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2015.

H. Salim HS. dan Erlina Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2015.

H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke Enam, Jakarta : Sinar Grafika, 2015.

Jeremy Bentham. *Teori Perundang-Undangan:Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata Dan hukum Pidana*. Bandung; Nuansa, 2016.

J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia, Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995

Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, Cetakan V, 2013.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006.

Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia, 2015.

_____, *Dinamika Teori Hukum*, , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.

Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2007.

- M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Bandung; Mandar Maju, 2007.
- Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Commom Law, Civil Law dan Socialist Law*, Jakarta : Diadit Media, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Kencana : Jakarta, 2009.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1984.
- R. Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*. sebagaimana dikutip dalam buku R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*. Cetakan Ke Sembilan, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Satjipto Rahardjo. *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta : Genta Publishing, Cetakan IV, 2013.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Ke Enam. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Suratman dan H. Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Alfabeta, 2014.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia

- Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dirubah ke dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014.
- Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Kawasan Reklamasi Pantai.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Singapura

Constitution of the Republic of Singapore Act 1965, Singapore.

Foreshores Act 1985, Singapore.

WEB

<https://interaktif.kompas.id/reklamasijakarta>, di akses pada tanggal 29 oktober 2017 pukul 23.00 wib.

<https://www.merdeka.com/jakarta/survei-indo-barometer-mayoritas-warga-tolak-reklamasi-teluk-jakarta>. Pada tanggal 8 Februari 2018 pukul 20:30.

<https://wordpress.com/tag/tata-kota/>. pada tanggal 25 Desember 2017 pukul 19.17.

<http://www.nlb.gov.sg/biblioasia/2017/04/04/> diakses pada tanggal 9 Desember 2017 Pukul 21.30 WIB.

<http://www.kajianpustaka.com/2016/09/pengertian-tujuan-dan-dampak-reklamasi>, di akses 14 November 2017, jam 2:15 WIB.

<http://hwc2015.nvo.or.id/504-belanda-daratan-yang-terbentuk-dari-laut/> pada tanggal 7 Desember 2017 pukul 19.17

<http://web.unep.org/ourplanet/october-2016/articles/singapore-story> diakses pada tanggal 9 Desember 2017 Pukul 21.30 WIB.

DAN LAIN LAIN

Direktorat Jenderal Penataan Ruang, *Kawasan reklamasi Pantai*, Departemen Pekerjaan Umum Indonesia, Pedoman Perencanaan Tata Ruang, Cetakan II, 2008.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi ke Empat. Jakarta: Gramedia.